



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BATANG**





<https://batangkab.bps.go.id>

**INDIKATOR**

**KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**KABUPATEN BATANG**

**2023**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BATANG 2023

Katalog : 4101002.3325

No. Publikasi : 33250. 2331

Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 78 halaman

Naskah : Tim Neraca Wilayah dan Analisis

Penyunting : Tim Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit : Tim Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang

Dicetak oleh : CV. Vertikal Grafika

## TIM PENYUSUN

Pengarah	:	Heni Djumadi
Penanggung Jawab	:	Sri Winarsih
Editor	:	Sri Winarsih
Penulis	:	Anis Yuliasuti Ayu Tiara Ashar Putri Gilang Alip Utama Moch. Choeril Anwar Ria Dwi Agustin
Pengolah Data	:	Ayu Tiara Ashar Putri
Infografis	:	Ria Dwi Agustin
Tata Letak	:	Ayu Tiara Ashar Putri

# KATA PENGANTAR

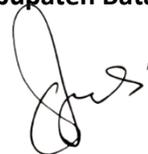
---

Buku Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2023** merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu. Istilah kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semuanya dapat diukur. Data yang digunakan bersumber dari data primer hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja Nasional serta data dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi ini menyajikan statistik dan indikator kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Statistik yang dicakup antara lain meliputi aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Dengan demikian, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2023 diharapkan mampu menjembatani penyedia dan pengguna data.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berperan dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih dengan tulus. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data.

Batang, Desember 2023  
**Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Batang**



Heni Djumadi

## DAFTAR ISI

	Halaman
Katalog.....	ii
Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Bab 1 Kependudukan.....	1
Bab 2 Kesehatan dan Gizi.....	13
Bab 3 Pendidikan.....	21
Bab 4 Ketenagakerjaan.....	35
Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi.....	47
Bab 6 Perumahan.....	57
Bab 7 Kemiskinan.....	65
Bab 8 Kesimpulan.....	70
Daftar Pustaka.....	75

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Batang, 2021-2023 .....	5
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Batang, Tahun 2021-2023 .....	6
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2021-2023	7
Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2021-2023.....	9
Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang sedang Menggunakan alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan, Kabupaten Batang, 2021-2023 .....	11
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Kabupaten Batang, 2021-2023 .....	18
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021 -2023 .....	27
Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021-2023 .....	28
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2021-2023 .....	29
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021 -2023 .....	30
Tabel 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru, Guru-Sekolah 2019/2020 - 2022/2023 .....	32
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019-2023 .....	39
Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2022 -2023.....	41
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2021 – 2023 .....	42
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2021– 2023	44

Tabel 5.1	Rata -rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2021-2023 .....	50
Tabel 5.2	Rata - rata Pengeluaran untuk Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Jenis Komoditas (Rupiah), 2023 .....	51
Tabel 5.3	Rata - rata Pengeluaran untuk Bukan Makanan per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2023 .....	52
Tabel 5.4	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok 53 Pengeluaran, 2023 .....	53
Tabel 5.5	Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2023.....	54
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021– 2023 .....	60
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai per Kapita, 2021 – 2023 .....	61
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan , 2021– 2023 .....	62
Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2021 – 2023 .....	64
Tabel 7.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2021 – 2023 .....	68
Tabel 7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan kemiskinan, 2021-2023 (Rp/Kapita/Bulan) .....	68

## DAFTAR GAMBAR

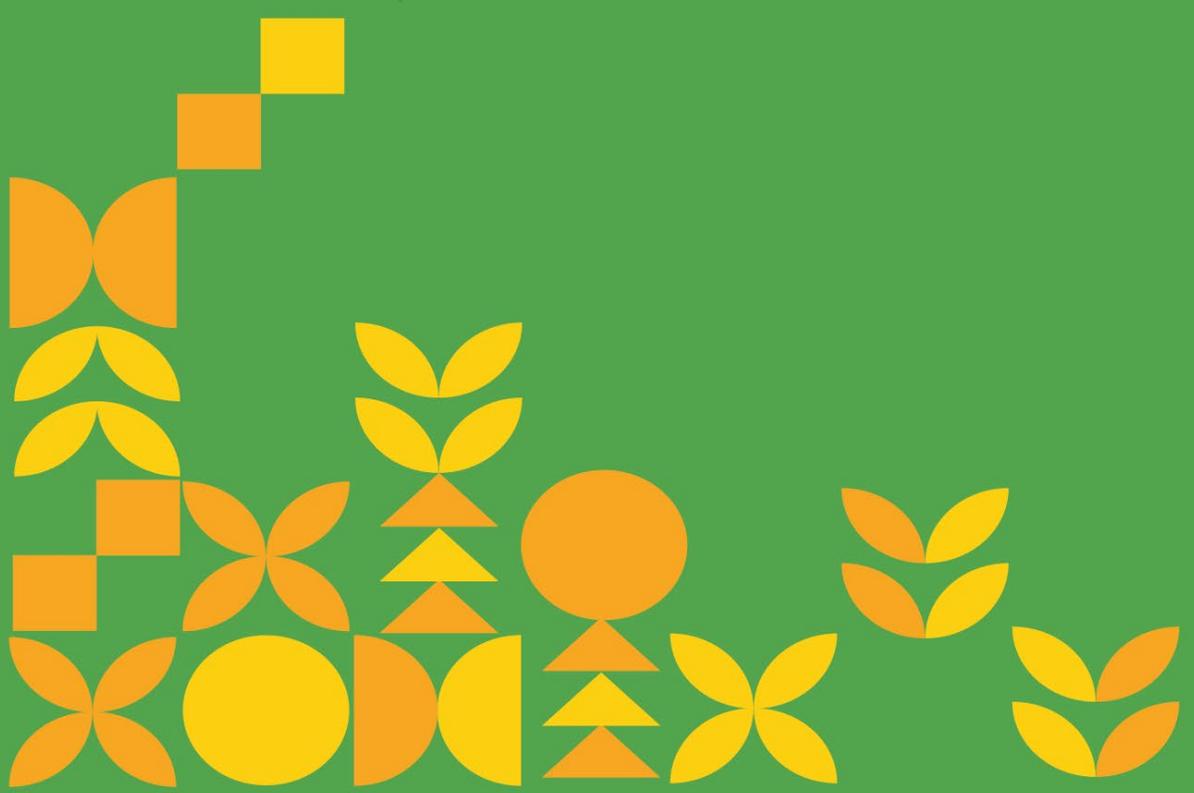
	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Batang, 2021-2023 .....	8
Gambar 2.1 Angka Kesakitan (Persen), 2021 – 2023 .....	16
Gambar 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, 2021-2023 (Tahun) .....	26
Gambar 4.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal, 2021-2023 .....	45



**1**

**KEPENDUDUKAN**

<https://bangkab.bps.go.id>





<https://batangkab.bps.go.id>



# BAB 1

## KEPENDUDUKAN



Penduduk menjadi objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Oleh karena itu kependudukan merupakan isu yang menarik untuk dicermati. Jumlah penduduk yang tinggi telah menjadi perhatian dunia dengan berbagai teori dan penelitian. Perkembangan terakhir dewasa ini, dalam teori Neo-Malthusian yang banyak dilaksanakan di berbagai negara, pembatasan jumlah penduduk dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Urgensi dari pengendalian jumlah penduduk ini untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak. Hal ini dituangkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya dengan salah satu fokusnya yaitu peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengaturan persebaran penduduk melalui fasilitas program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi serta peningkatan kualitas keluarga.

Pemenuhan kebutuhan hidup penduduk yang tidak tercapai, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman yang tidak layak huni, akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya yaitu terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, ketimpangan, dan distribusi penduduk juga merupakan masalah serius yang harus segera ditangani oleh



Pemerintah. Kebijakan Pemerintah terkait kependudukan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk, harus terus dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat menjadi layak dan semakin baik.

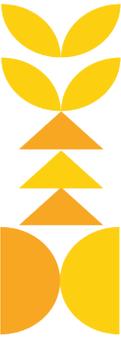
## JUMLAH, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk Kabupaten Batang tercatat sebanyak 828.883 jiwa, terdiri dari 417.808 jiwa penduduk laki-laki dan 411.075 jiwa penduduk perempuan. Selama periode tahun 2021-2023, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan menurun. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,27 persen pada tahun 2021 menjadi 1,17 persen pada tahun 2023.

Komposisi penduduk (rasio jenis kelamin) merupakan salah satu indikator penting dalam demografi. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Pada umumnya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Data mengenai rasio jenis kelamin bermanfaat untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan *gender* terutama terkait dengan pemerataan pembangunan gender secara adil. Sebagai contoh, informasi rasio jenis kelamin penting diketahui oleh politisi untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam parlemen ([sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id)).

Apabila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2021-2023 lebih dari 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2023 sebesar 101,64. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang perempuan ada 102 orang laki-laki. Dengan kata lain penduduk laki-laki di Kabupaten Batang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.



**Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Batang, 2021-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan (Persen)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	408 463	400 957	809 420	1,27	101,87
2022	413 217	406 077	819 294	1,22	101,76
2023	417 808	411 075	828 883	1,17	101,64

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang

## PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kabupaten Batang adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan kurangnya optimalisasi sumberdaya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja, padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.



**Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Batang Tahun 2021-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
2021	809 420	788,64	1 026
2022	819 294	788,64	1 039
2023	828 883	788,64	1 051

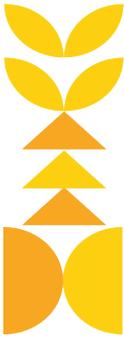
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang

Perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Batang selama 2021-2023 menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk Kabupaten Batang yaitu 1.026 jiwa/km<sup>2</sup>, meningkat menjadi 1.039 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 1.051 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu km<sup>2</sup> terdapat jumlah penduduk sebanyak 1.051 jiwa. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu sumber ekonomi, pusat pendidikan, ketersediaan fasilitas umum, dan daya saing wilayah.

## ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat



menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan, 2021-2023**

Tahun	0-14 tahun	65+ tahun	15-64 tahun	Jumlah	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	189 214	53 733	566 473	809 420	42,89
2022	190 889	57 261	571 144	819 294	43,45
2023	192 453	60 893	575 537	828 883	44,02

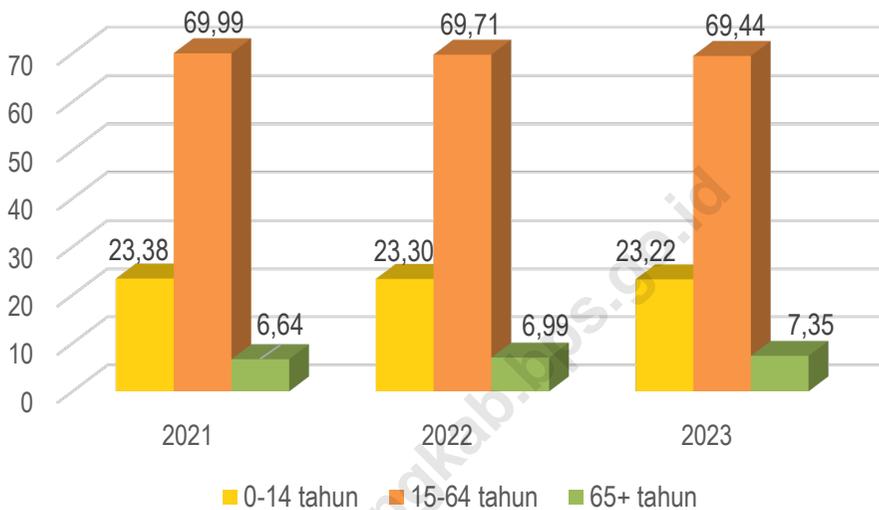
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang

Selama periode 2021-2023, angka beban ketergantungan di Kabupaten Batang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka beban ketergantungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 42,89 persen, artinya 100 penduduk usia produktif masih menanggung sekitar 43 penduduk usia tidak produktif (penduduk dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 angka beban ketergantungan di Kabupaten Batang sebesar 44,02 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 44 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Struktur umur penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2021-2023 masih didominasi oleh penduduk usia produktif (penduduk umur 15-64 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Batang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Besarnya proporsi usia produktif tersebut merupakan sinyal adanya bonus demografi yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dari hasil proyeksi penduduk pada tahun 2021-2023, proporsi penduduk usia produktif semakin berkurang. Pada tahun 2021 proporsi penduduk usia produktif sebesar 69,99 persen turun menjadi 69,44 persen pada tahun 2023. Sementara itu, proporsi penduduk yang belum produktif yang berusia muda (0-14 tahun), pada tahun 2021



sebanyak 23,38 persen, hingga tahun 2023 berkurang menjadi 23,22 persen. Hal ini menunjukkan program Keluarga Berencana (KB) masih tetap berlangsung dan menunjukkan keberhasilannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Batang

### **Gambar 1.1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Batang, 2021-2023**

Sedangkan proporsi penduduk yang berusia 65 tahun ke atas semakin meningkat dari hasil proyeksi penduduk pada tahun 2021 sebanyak 6,64 persen dan naik menjadi 7,35 persen pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas ini merupakan hal yang positif, karena menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik, sehingga penduduk mempunyai harapan hidup yang lebih panjang. Walaupun di sisi lain juga merupakan tantangan karena dengan bertambahnya jumlah penduduk tua akan meningkatkan angka beban ketergantungan.

## **WANITA MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA**

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin



muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

**Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2021 – 2023**

Umur Perkawinan Pertama	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
<17	21,47	21,74	20,64
17 - 18	27,32	26,81	24,95
19 - 20	23,53	23,56	24,10
>=21	27,68	27,89	30,32

*Sumber : Diolah dari Hasil Susenas*

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa usia perkawinan wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia dibawah 17 tahun dan usia 17-18 tahun mengalami penurunan. Pada kelompok usia dibawah 17 tahun, persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada kelompok usia tersebut menurun dari 21,74 persen pada tahun 2022, menjadi 20,64 persen pada tahun 2023. Sementara pada kelompok



usia 17-18 tahun, persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada kelompok usia tersebut menurun dari 26,81 persen pada tahun 2022, menjadi 24,95 persen pada tahun 2023. Hal ini merupakan hal yang positif karena perkawinan pada usia dibawah 17 tahun dan 17-18 tahun dapat mengindikasikan berbagai hal, diantaranya pergaulan bebas, putus sekolah, pemahaman akan kesehatan reproduksi yang rendah, maupun pengaruh budaya. Selain itu menurunnya angka perkawinan sebelum usia 17 tahun dan 17-18 tahun juga menjadi indikasi positif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, karena dengan adanya penundaan usia menikah maka akan memperpendek masa reproduksi.

Persentase perkawinan pertama wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin terbanyak di Kabupaten Batang pada tahun 2023 berada pada kategori usia di atas 21 tahun. Persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada kelompok usia 19-20 tahun meningkat dari 23,56 persen pada tahun 2022, menjadi 24,10 persen pada tahun 2023. Sementara persentase wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada kelompok usia diatas 21 tahun meningkat dari 27,89 persen pada tahun 2022, menjadi 30,32 persen pada tahun 2023. Peningkatan usia perkawinan pertama pada usia 19-20 tahun dan diatas 21 tahun merupakan hal yang cukup baik, karena organ reproduksi wanita pada kelompok usia tersebut sudah cukup siap dan matang. Selain itu, pada umur tersebut secara umum seseorang sudah tamat pendidikan setara SMA ataupun strata satu perguruan tinggi. Perkawinan pertama pada umur di atas 19 tahun juga sudah sesuai dengan anjuran BKKBN, sehingga diharapkan dapat membantu suksesnya program keluarga berencana.

## PENGUNAAN ALAT/CARA KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program Pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan mengurangi angka kematian ibu. Penerapan program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan



Implant. Apabila cakupan peserta KB semakin meningkat, maka diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Pilihan seseorang dalam menentukan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, harga, kepraktisan dalam penggunaan, minim resiko kegagalan, resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berbagai macam alat/cara KB digunakan oleh pasangan usia subur di Kabupaten Batang. Alat/cara KB yang paling banyak peminatnya adalah penggunaan alat KB suntikan yang bersifat jangka pendek. Pil dan suntik termasuk alat KB Non-MKJP (tidak termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang rawan putus dalam penggunaannya. Kepala BKKBN menyatakan bahwa untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penggunaan MKJP akan lebih efektif. Penggunaan metode suntikan menjadi persentase terbesar penggunaan alat KB, kemudian diikuti penggunaan Susuk KB/Implan, dan pil KB.

**Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan, Kabupaten Batang 2021-2023**

Alat/Cara KB	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
IUD/AKDR/Spiral	4,26	7,70	9,55
Suntikan	59,41	51,48	53,63
Susuk KB/Implan	12,74	15,17	16,88
Pil	15,89	18,62	15,30
Kondom /Karet KB	0,38	0,47	1,02
Lainnya	7,32	6,57	3,62

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas



Saat ini lebih dari 50 persen wanita usia subur (WUS) sedang menggunakan alat/cara KB dengan metode suntik. Persentase penggunaan alat KB suntikan mengalami peningkatan dari 51,48 persen pada tahun 2022, menjadi 53,63 persen pada tahun 2023. Penggunaan alat KB suntikan ini cenderung dianggap lebih aman dan murah. Penggunaan alat/cara KB terbesar kedua adalah Susuk KB/Implan. Persentase penggunaan alat KB susuk KB/Implan mengalami peningkatan dari 15,17 persen pada tahun 2022, menjadi 16,88 persen pada tahun 2023. Sedangkan penggunaan alat/cara KB terbesar ketiga adalah pil KB yang mencapai 15,30 persen pada tahun 2023. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding pada tahun 2022 yang mencapai 18,62 persen.

Penggunaan alat/cara KB jangka panjang diantaranya terdapat MOW/Tubektomi, MOP/Vasektomi dan AKDR/IUD/Spiral. Penggunaan alat/cara AKDR/IUD/Spiral pada tahun 2022 sebesar 7,70 persen, kemudian meningkat menjadi 9,55 persen pada tahun 2023. Alat KB jangka panjang terutama MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi masih belum begitu populer di kalangan masyarakat.

## Angka Kesakitan (Morbiditas)

**12,66**  
Persen

Persentase penduduk Kabupaten Batang yang mengalami tingkat gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari



## Fasilitas Pelayanan Berobat Jalan



Sebagian besar penduduk Kabupaten Batang berobat jalan mendatangi **praktek dokter / klinik / bidan / balai pengobatan**

**59,41**  
Persen





<https://batangkab.bps.go.id>



## BAB 2

# KESEHATAN & GIZI



Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Pemerintah Kabupaten Batang menuangkan program kesehatan dalam RPJPD 2005-2025 dan dalam pelaksanaannya pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup Ibu dan Bayi.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Puskesmas, Rumah Sakit, Poskesdes dan Posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

### DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Menurut *Hendrik L. Blumm* seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di *University of California*, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu faktor perilaku, lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling sulit dalam mengatasinya jika



penyakit sudah diderita, maka yang terbaik adalah pencegahan yang dilakukan sebelum penyakit secara keturunan ini muncul. Tiga faktor lain dapat diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin membaiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat dalam memberikan dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, maka semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut, dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

**Gambar 2.1 Angka Kesakitan (Persen), 2021 – 2023**



Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021-2023, menunjukkan angka kesakitan penduduk di Kabupaten Batang cenderung meningkat, pada tahun 2021 mencapai 8,50 persen, bertambah menjadi 11,57 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 12,66 persen pada tahun 2023. Demikian juga bila diperhatikan menurut jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, angka kesakitannya meningkat setiap tahun. Angka kesakitan laki-laki tahun 2021 sebesar 7,9 persen, naik menjadi 9,89 persen pada tahun 2022, dan naik menjadi 11,15 persen pada tahun 2023. Sedangkan angka kesakitan perempuan meningkat dari 9,1 persen pada tahun 2021, menjadi 13,28 persen pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 14,17 persen tahun 2023. Angka kesakitan laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan dengan perempuan karena faktor pola hidup dan aktivitas sehari-hari serta perilaku manusia.

Semakin besar rata-rata lama sakit, maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

## PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial-ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri merupakan faktor yang dominan.



**Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Batang, 2021 – 2023**

Fasilitas Pelayanan	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	5,02	2,55	5,41
Rumah Sakit Swasta	3,98	2,97	6,37
Praktek Dokter/ Klinik/ Bidan/ Balai Pengobatan	79,71	62,37	59,41
Puskesmas	14,43	33,03	29,71
Pengobatan Tradisional	2,15	1,02	2,60
Lainnya	0,36	0,00	0,42

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Penjaminan kesehatan masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS, membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum dalam mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan pembayaran premi yang terjangkau. Tidak hanya di Puskesmas dan Rumah Sakit, fasilitas BPJS dapat pula dinikmati di klinik kesehatan terdekat dan dokter keluarga. Pola yang didapat masih sama dengan periode sebelumnya yakni praktek dokter/ klinik/ bidan/ balai pengobatan menjadi tujuan mayoritas masyarakat dalam berobat. Dipilihnya fasilitas ini karena lebih banyak tersebar di seluruh wilayah dan prosedurnya lebih mudah dibandingkan di rumah sakit.

Pada hasil Susenas terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir (2021 - 2023), sebagian besar masyarakat berobat jalan ke praktek dokter/ klinik/ bidan/ balai pengobatan dan puskesmas dikarenakan praktek dokter/ klinik/ bidan/ balai pengobatan dan puskesmas yang menjadi mitra BPJS merupakan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pada tahun 2023 sekitar 59,41 persen penduduk berobat jalan pada fasilitas kesehatan praktek dokter/ klinik/ bidan/ balai pengobatan. Persentase ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 62,37 persen. Fasilitas kesehatan berikutnya yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat adalah puskesmas yaitu sekitar 29,71 persen. Persentase ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai



33,03 persen. Penurunan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada praktek dokter/ klinik/ bidan/ balai pengobatan dan puskesmas tersebut, seiring dengan peningkatan cukup signifikan pada rumah sakit swasta sebagai tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat yaitu 2,97 persen pada tahun 2022 menjadi 6,37 persen pada tahun 2023. Fasilitas pelayanan kesehatan berikutnya yang dikunjungi oleh masyarakat adalah rumah sakit pemerintah sebesar 5,41 persen, diikuti pengobatan tradisional sebesar 2,60 persen, dan lainnya sebesar 0,42 persen.

## FENOMENA VIRUS COVID-19

Kesehatan global mengalami ujian mulai tahun 2020 dengan merebaknya virus Covid-19 hampir di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi adanya pasien yang positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Di Jawa Tengah, Gubernur mengumumkan adanya pasien yang terinfeksi Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Sedangkan di Kabupaten Batang pada tanggal 27 Maret 2020, Bupati memerintahkan *tracing* lingkungan untuk menemukan siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan pasien Covid-19 (pegawai PLTU yang dirawat di Surabaya).

Covid-19 merupakan virus yang berbahaya karena dapat menyebabkan kematian terutama bagi pasien yang sudah memiliki gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker, asma, dan lain-lain. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19 diantaranya memberlakukan gerakan hidup sehat dengan gerakan mencuci tangan dan selalu memakai masker. Selain itu juga menerapkan metode belajar siswa dari rumah atau *School From Home* (SFH) dan pengaturan hari kerja dari rumah terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) atau *Work From Home* (WFH). Kemudian juga melakukan pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 serta pemberian vaksinasi kepada masyarakat.

Setelah tiga tahun lebih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengerahkan seluruh sarana prasana, utamanya pemberian vaksin Covid-19 kepada seluruh penduduk Indonesia, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mencabut status pandemi dan memasuki masa endemi Covid-19 sejak 21 Juni 2023. Keputusan tersebut



diambil sejalan dengan pencabutan status *public health emergency of international concern* (PHEIC) untuk Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut jga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di tanah air yang mendekati nihil. Memasuki masa endemi ini, masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hari serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Selain itu diharapkan dengan pencabutan ini dapat meningkatkan geliat perekonomian di tanah air.

<https://batangkab.bps.go.id>

# PENDIDIKAN

# 3

## Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

**7,07**  
Tahun

Penduduk baru bisa bersekolah rata-rata selama 7 tahun lebih atau setara kelas 1 SMP atau sederajat



## Harapan Lama Sekolah (HLS)

Anak usia 7 tahun saat ini diharapkan dapat merasakan pendidikan selama 12 tahun atau kira-kira hingga menyelesaikan SMA atau sederajat

**12,15**  
Tahun



## Angka Partisipasi Murni (APS)



SD/MI  
**97,89%**



SMP/MTS  
**81,50%**



SMA/SMK/MA  
**54,48%**



<https://batangkab.bps.go.id>



## BAB 3 PENDIDIKAN



Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara adalah sama dan tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya, serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait



dengan pendidikan, baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, maupun ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar serta daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Mengacu pada pembahasan diatas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan didalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Rasio Murid Guru menurut tingkat pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS dan registrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

## RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA

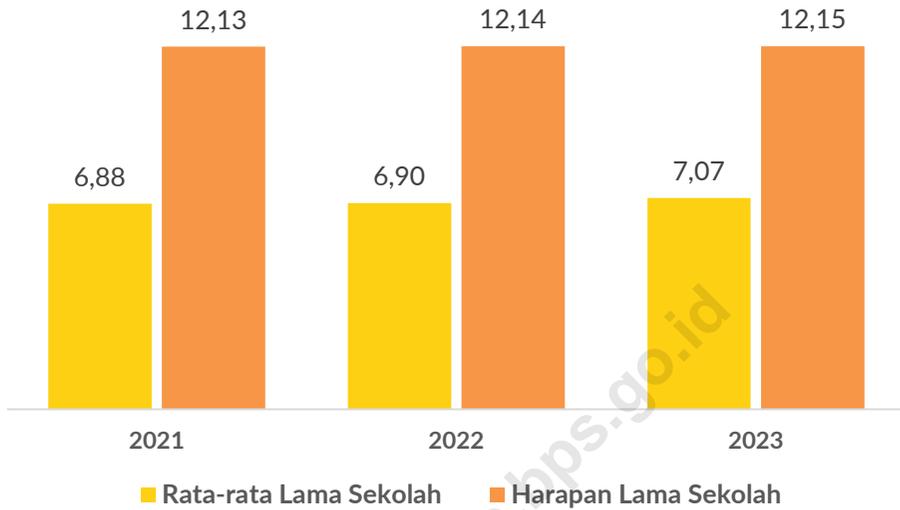
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang digunakan dalam penghitungan IPM diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena pada usia tersebut proses belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan



meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak-anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyiapkan tiga skenario untuk mendongkrak rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari 8,01 tahun pada tahun 2012 menjadi 12 tahun pada 2045. Skenario pertama adalah untuk mencapai sasaran 12,35 tahun atau hampir sama dengan Amerika Serikat pada tahun 1995. Skenario kedua adalah untuk mencapai 13,17 tahun, sedangkan skenario ketiga adalah untuk mencapai 14,05 tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi program pendidikan menengah universal (PMU) supaya anak usia sampai dengan 18 tahun paling tidak pendidikannya sudah 12 tahun yaitu lulusan SMA, SMK, dan MA (<http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/1977>).

Secara umum di Kabupaten Batang, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas semakin membaik, hingga pada tahun 2023 mencapai 7,07 tahun. Artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Batang baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan lulus SD atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Jika dilihat perkembangannya selama 2021-2023, rata-rata lama sekolah memang makin meningkat, namun peningkatannya masih minim. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas belum berminat untuk menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun walau upaya Pemerintah yang menginginkan kualitas pendidikan penduduknya makin baik terus digencarkan dengan cara membuka program Kejar Paket A, B dan C pada setiap Kecamatan. Hal ini terkait dengan kesibukan penduduk usia 25 tahun ke atas untuk mencari nafkah, atau mengurus rumah tangga sehingga tidak punya waktu untuk mengejar Pendidikan.



Sumber: BPS

**Gambar 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, 2021 – 2023 (Tahun)**

Indikator ini mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun ke atas). HLS Kabupaten Batang pada tahun 2023 sebesar 12,15 tahun, artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang bersekolah sampai 12 tahun atau lulus SLTA jika kondisinya minimal sama seperti sekarang. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka HLS ini juga semakin meningkat seiring dengan keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, dengan cara mengenyam pendidikan yang makin tinggi. Di Kabupaten Batang, beberapa perguruan tinggi telah didirikan yaitu Universitas Selamat Sri dan PSDKU Undip, hal ini diharapkan akan lebih meningkatkan animo masyarakat untuk berpendidikan sampai jenjang tertinggi.

## PENDIDIKAN TINGGI YANG DITAMATKAN

Selain indikator pendidikan, kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi akan dapat memiliki pengetahuan yang luas dan



keterampilan/keahlian yang tinggi, sehingga akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah.

**Tabel 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021 – 2023**

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
≤SD/MI	54,53	53,60	52,30
SMP/MTS	23,78	23,43	24,41
SMA/SMK/MA	17,66	18,76	18,87
Perguruan tinggi	4,03	4,21	4,41

Sumber : Diolah dari Susenas

Berdasarkan hasil Susenas, selama tahun 2021 – 2023 persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah yaitu tidak pernah bersekolah, belum tamat pendidikan setara SD dan hanya tamat setara SD masih cukup besar mencapai sekitar 52 persen namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah persentase penduduk yang menamatkannya. Pada tahun 2023 persentase lulusan jenjang pendidikan SMP hingga Perguruan Tinggi mengalami peningkatan. Peningkatan persentase ini sangat baik, dimana setelah dilanda pandemi yang menyebabkan sistem pendidikan bergeser ke online dan menyebabkan kendala, di masa setelah pandemi ini kegiatan belajar mulai kembali secara tatap muka.

Pada periode tahun 2021 - 2023, penduduk usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah persentase yang menamatkannya. Lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan setara SD ke bawah baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan pada tahun 2023 mencapai 50,62 persen untuk laki-laki dan perempuan sebesar 53,96 persen. Pada jenjang pendidikan



setara SD ke bawah ini persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas lebih tinggi daripada laki-laki.

**Tabel 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin & Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021 – 2023**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Total		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
≤SD/MI	52,08	51,18	50,62	56,96	56,03	53,96	54,53	53,60	52,30
SMP/MTS	25,60	24,23	24,11	21,98	22,62	24,72	23,78	23,43	24,41
SMA/SMK/MA	19,00	21,23	21,22	16,34	16,28	16,55	17,66	18,76	18,87
Perguruan tinggi	3,32	3,36	4,05	4,72	5,07	4,77	4,03	4,21	4,41

Sumber : Diolah dari Susenas

Pada jenjang pendidikan setara SMP, persentase cenderung berimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu sekitar 24 persen sedangkan pada jenjang setara SMA, persentase penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada perempuan usia 15 tahun ke atas yang sudah tamat pendidikan perguruan tinggi mengalami penurunan, namun persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, laki-laki usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi sebesar 4,05 persen sementara perempuan sebesar 4,77 persen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesetaraan gender yang semakin baik di Kabupaten Batang.

## ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada setiap



jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

APS yaitu Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada Tabel 3.3 di bawah ini, berdasar data Susenas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun, secara umum sudah baik yaitu sebesar 98,92 persen. APS menurut jenis kelamin, pada perempuan lebih baik daripada laki-laki. APS Perempuan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2021 dan 2023, sedangkan tahun 2022 sebesar 99,99 persen. APS laki-laki tahun 2023 sebesar 97,78 persen menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,97 persen.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin, 2021 – 2023 (Persen)**

Kelompok Umur	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7-12	99,48	100,00	99,74	99,97	99,99	99,98	97,78	100,00	98,92
13-15	94,90	98,37	96,43	95,47	97,35	96,18	96,57	95,97	96,24
16-18	68,46	61,38	64,95	68,18	59,29	63,86	60,31	68,09	63,60

Sumber : Diolah dari Susenas

Pada penduduk kelompok usia 13-15 tahun, APS laki-laki lebih baik daripada perempuan. Pada tahun 2023 APS perempuan hanya mencapai 95,97 persen menurun dari tahun sebelumnya 96,18 persen, sedangkan pada APS laki-laki pada tahun 2023 mencapai 96,57 persen, kondisi tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022 hanya mencapai 95,47 persen.

Pada kelompok usia 16-18 tahun APS laki-laki dan perempuan mengalami fenomena yang berbeda. APS laki-laki mengalami penurunan sedangkan APS perempuan mengalami peningkatan. Pada kelompok usia ini, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Bahkan pada tahun 2022 APS perempuan hanya 59,29 persen meningkat



menjadi 68,09 persen sedangkan APS laki-laki yang sebelumnya mencapai 68,18 persen pada tahun 2023 mengalami penurunan pada 60,31 persen. Selain APS, terdapat pula Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Untuk mengetahui perkembangan APM di Kabupaten Batang, dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 menunjukkan, APM pada jenjang pendidikan SD tahun 2023 mencapai 97,89 persen lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya 96,98 persen. Pada tahun 2023, APM laki-laki pada jenjang pendidikan setara SD lebih rendah yaitu 96,96 persen jika dibandingkan APM perempuan yang sebesar 98,76 persen. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, secara umum APM tahun 2023 membaik dibanding tahun 2022., Penurunan APM terjadi hanya pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK pada APM laki-laki yaitu dari 60,77 persen pada tahun 2022, menjadi sebesar 47,77 persen pada tahun 2023. Pada jenjang pendidikan SMA, APM perempuan yang sempat mengalami penurunan dari 49,55 persen pada tahun 2021 menjadi 47,29 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 APM perempuan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 63,61 persen. Bila dilihat secara umum APM pada jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya 54,21 persen menjadi 54,48 persen di tahun 2023.

**Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021 – 2023 (Persen)**

Jenjang Pendidikan	2021			2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD/MI	93,32	99,45	96,43	98,14	95,92	96,98	96,96	98,76	97,89
SMP/MTs	73,54	87,91	79,88	82,25	75,31	79,62	84,29	79,15	81,50
SMA/MA/SMK	59,97	49,55	54,80	60,77	47,29	54,21	47,77	63,61	54,48

Sumber : Diolah dari Susenas



## KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan adalah pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidik antara lain rasio murid-guru, rasio guru-sekolah.

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid, sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Dengan kata lain, jika rasio makin tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani makin banyak murid. Makin banyak murid yang diajarkan, maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogik, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Selama tiga tahun terakhir, pada Tabel 3.5 di bawah, dari tahun ajaran 2019/2020 sampai 2021/2022 cenderung terjadi penurunan rasio murid-guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Penurunan rasio murid-guru SD menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah siswa SD semakin diimbangi dengan penambahan jumlah guru. Mengingat karakteristik siswa SD yang membutuhkan perhatian khusus, maka penurunan rasio murid-guru akan membuat proses belajar mengajar menjadi semakin efektif. Namun pada tahu



ajaran 2022/2023 terjadi peningkatan rasio guru dan murid, dari tahun ajaran sebelumnya 14 siswa per guru menjadi 16 siswa per guru. Hal yang sama dengan jenjang pendidikan SD, rasio murid guru pada jenjang pendidikan SMP dan SMA juga mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2022/2023. Pada jenjang pendidikan SMP yang semula 13 siswa per guru pada tahun ajaran 2021/2022 menjadi 17 siswa per guru pada tahun ajaran 2022/2023. Demikian pula untuk tingkat SMA dari 15 siswa per guru pada tahun ajaran 2021/2022 menjadi 16 siswa per guru.

**Tabel 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah, 2019/2020-2022/2023**

Tahun	Rasio					
	Murid Guru			Guru Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019/2020	21,34	20,30	18,79	6,28	15,35	21,47
2020/2021	15,62	16,55	15,49	8,60	18,29	26,03
2021/2022	14,36	13,64	15,37	9,46	22,04	26,57
2022/2023	16,34	16,70	15,67	8,12	19,11	26,27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tiap SD harus memiliki satu guru untuk setiap 32 murid. Pada prakteknya di Kabupaten Batang setiap guru hanya mengampu 16 siswa SD, walaupun rasio murid-guru sudah sangat ideal akan tetapi harus diwaspadai sebarannya yang tidak merata. Kemendikbud sudah melakukan pemetaan, melihat di kawasan mana guru tersertifikasi menumpuk di satu sekolah. Dari sekolah-sekolah seperti itulah, guru akan didistribusi, disalurkan ke sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

Rasio guru-sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada



suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu jenjang pendidikan tertentu, sebaliknya makin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah, untuk itu maka kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.

Secara umum, pada Tabel 3.6 di atas, pada tahun 2019/2020 terjadi peningkatan rasio guru sekolah untuk semua jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA hingga tahun ajaran 2021/2022. Namun pada tahun ajaran 2022/2023 terjadi penurunan rasio guru sekolah. Rasio guru sekolah dari jenjang SD menurun dari 9 guru per sekolah menjadi 8 guru per sekolah di tahun ajaran 2022/2023. Pada jenjang SMP, rasio guru sekolah dari 22 guru per sekolah menjadi 19 guru per sekolah, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK cenderung tetap pada 26 guru per sekolah. Terjadinya penurunan jumlah rasio guru sekolah ini kemungkinan terjadi karena peningkatan jumlah sekolah namun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah guru yang memadai atau guru mengalami penurunan akibat memasuki masa purna tugas. Dapat diperhatikan adanya sekolah baru baiknya dilengkapi dengan jumlah guru pengajar yang memadai serta tata kelola kepegawaian yang baik, sehingga pengajar yang memasuki purna tugas telah disiapkan penggantinya.



<https://batangkab.bps.go.id>



**4**

**KETENAGAKERJAAN**



<https://bangkab.bps.go.id>



<https://batangkab.bps.go.id>



## BAB 4

# KETENAGAKERJAAN



Penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan sangat membutuhkan data dan informasi terkini sebagai barometer untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan di suatu wilayah. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang terukur juga merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labour Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari dua bagian yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara penduduk bukan angkatan kerja mencakup penduduk yang kegiatannya sekolah, atau yang mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Secara alamiah, pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja diserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran kerja dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

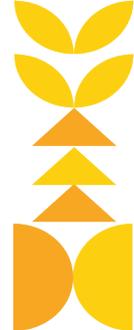


Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. Beberapa indikator yang dianalisa mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dilihat menurut jenis kelamin dan juga tingkat pendidikan. Indikator lain yang dikaji adalah serta penduduk bekerja menurut kelompok lapangan usaha. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).

## TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur fenomena tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif dan tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi (menghasilkan barang dan jasa). Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha, atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumahtangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.



**Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja & Tingkat Pengangguran Terbuka, 2019-2023 (Persen)**

Tahun	TPAK			TPT		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	82,61	54,70	<b>68,53</b>	5,16	2,69	<b>4,16</b>
2020	86,48	53,24	<b>69,78</b>	6,48	7,63	<b>6,92</b>
2021	85,49	57,45	<b>71,40</b>	6,01	7,43	<b>6,59</b>
2022	88,40	61,51	<b>74,90</b>	7,75	5,07	<b>6,64</b>
2023	88,45	64,71	<b>76,62</b>	6,15	5,93	<b>6,06</b>

Sumber : Diolah dari Sakernas

Selama lima tahun terakhir, TPAK Kabupaten Batang secara umum memiliki tren yang meningkat. Adapun TPAK Kabupaten Batang pada tahun 2023 adalah 76,62 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sekitar 76 hingga 77 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, dalam kurun waktu 2019-2023, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Namun, laju kenaikan TPAK perempuan tampak lebih cepat. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Batang makin menggeliat.

Analisis TPAK tanpa variabel lainnya tampak kurang komprehensif, karena TPAK tidak dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang besar belum tentu menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang positif karena penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sebaliknya, jika porsi yang menganggur lebih besar, justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Tabel 4.1 juga menunjukkan perkembangan kondisi TPT di Kabupaten Batang. TPT merupakan indikator yang menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan



lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan. Ketidakseimbangan tersebut dicerminkan dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih kecil daripada pencari kerja, sehingga lapangan pekerjaan tidak mampu menampung para pencari kerja. Hasil SAKENAS menunjukkan perkembangan TPT di Kabupaten Batang selama periode 2019-2023 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2019, TPT berada di angka 4,16 persen, dan meningkat cukup signifikan pada 2020 menjadi 6,92 yang besar kemungkinan disebabkan oleh wabah covid-19 dan segenap pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang diberlakukan. Namun, seiring dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru serta sejumlah program penanggulangan covid-19 seperti pemberian vaksin secara masif, pada 2021 TPT Kabupaten Batang mengalami penurunan, yakni menjadi 6,59 persen.

Sementara itu, pada tahun 2022, TPT Kabupaten Batang kembali meningkat menjadi 6,64 persen sebelum akhirnya turun kembali di posisi 6,06 persen di 2023. Angka ini bermakna bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 6 orang yang menganggur diantara 100 orang angkatan kerja. Adapun jika dilihat menurut jenis kelamin, secara umum tingkat pengangguran laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran perempuan.

Lebih lanjut, pendidikan yang tinggi merupakan modal penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan yang sesuai harapan. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keahliannya. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menunggu pekerjaan yang sesuai, atau dengan kata lain menjadi penganggur untuk sementara waktu.

Perkembangan TPT menurut jenjang pendidikan selama periode 2021-2023 memiliki disparitas yang berbeda-beda. Jika pada tahun 2021 TPT menurut pendidikan



terdistribusi antara 4,52 persen sampai 12,73 persen antar jenjang pendidikan, pada tahun 2022 disparitasnya melebar yakni pada rentang 2,05 persen sampai 12,57 persen. Namun, disparitas tersebut kembali menyempit di tahun 2023 di angka 3,37 persen sampai 11,21 persen.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2021 – 2023 (Persen)**

Kelompok Usaha	2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
≤ SD	4,62	4,39	<b>4,52</b>	6,93	5,21	<b>6,20</b>	2,38	4,75	<b>3,37</b>
SMP	4,86	14,43	<b>8,53</b>	8,68	1,59	<b>5,79</b>	9,71	6,55	<b>8,36</b>
SMA Umum	4,29	12,86	<b>7,54</b>	7,61	8,92	<b>8,14</b>	14,43	6,89	<b>11,21</b>
SMA Kejuruan	15,93	5,14	<b>12,73</b>	13,64	9,95	<b>12,57</b>	9,84	12,18	<b>10,56</b>
Universitas	2,56	19,26	<b>12,03</b>	0,00	4,13	<b>2,05</b>	8,94	7,03	<b>7,84</b>

Sumber : Diolah dari Sakernas

Berdasarkan Tabel 4.2. juga tampak bahwa ada kecenderungan TPT lebih tinggi untuk tingkat pendidikan menengah atas. Pada tingkat pendidikan rendah dan yang belum pernah bersekolah hampir semua angkatan kerja dapat terserap di lapangan pekerjaan dengan segala kondisi dan jenis pekerjaan. TPT pada jenjang pendidikan SMA baik SMA Umum maupun Kejuruan memiliki TPT tertinggi dibandingkan TPT pada jenjang pendidikan lainnya, yakni mencapai lebih dari 10 persen. Di satu sisi, TPT pada tingkat pendidikan perguruan tinggi/universitas relatif lebih rendah dibandingkan tingkat SMA. Hal ini disebabkan tamatan perguruan tinggi tidak sebanyak dibandingkan SMA sehingga sebagian besar lulusan perguruan tinggi masih cukup tertampung pada lapangan pekerjaan yang ada.



## LAPANGAN PEKERJAAN DAN STATUS

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam melihat penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran kelompok lapangan usaha dominan yang menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok lapangan usaha lapangan usaha yaitu pertanian (mencakup pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri (mencakup pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan), dan jasa-jasa (mencakup perdagangan besar, eceran, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan).

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2021 – 2023**

Kelompok Usaha	2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
Pertanian (A)	25,75	15,93	<b>21,81</b>	27,26	14,30	<b>21,82</b>	29,51	14,81	<b>23,31</b>
Industri (M)	37,69	31,15	<b>35,07</b>	36,50	31,18	<b>34,27</b>	35,90	33,16	<b>34,74</b>
Jasa-jasa (S)	36,56	52,92	<b>43,12</b>	36,24	54,52	<b>43,91</b>	34,59	52,03	<b>41,94</b>

Sumber: Diolah dari Sakernas

Catatan:

Pertanian(A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan.

Jasa-Jasa(S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.

Berdasarkan Tabel 4.3, perkembangan lapangan usaha selama 2021 – 2023 menunjukkan bahwa struktur penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha



relatif tidak berubah. Kelompok lapangan usaha jasa-jasa tercatat menjadi kelompok lapangan usaha paling dominan dibandingkan dua kelompok lapangan usaha lainnya (di atas 40 persen), diikuti oleh Industri manufaktur, dan kemudian kelompok lapangan usaha pertanian. Hal yang menarik disini adalah bahwa pada tahun 2023, persentase penduduk bekerja pada kelompok lapangan usaha pertanian kembali mengalami penguatan menjadi 23,31 persen meneruskan peningkatan tren di dua tahun sebelumnya.

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, gambaran pergeseran penyerapan tenaga kerja dari kelompok lapangan usaha pertanian menuju industri manufaktur, lebih terasa bagi pekerja perempuan. Selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk perempuan yang bekerja di kelompok lapangan usaha pertanian cenderung mengalami penurunan yakni dari 15,93 persen di tahun 2021 menjadi 14,81 persen di tahun 2023. Kontras dengan hal tersebut, persentase penduduk perempuan bekerja pada kelompok lapangan usaha industri manufaktur sebesar 31,15 persen di tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 33,16 persen di tahun 2023. Sedangkan pekerja laki-laki, justru terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja menuju kelompok lapangan usaha pertanian dari dua kelompok lapangan usaha lainnya. Hasil Sakernas mencatat bahwa pada tahun 2021, pekerja laki-laki di kelompok usaha pertanian pada 2021 sebesar 25,75 persen dan secara perlahan mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya (27,26 persen pada 2022 dan 29,51 persen pada 2023).

Indikator untuk melihat gambaran tentang status/kedudukan pekerja dalam aktivitas pekerjaan yang dijalani adalah distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama. Tabel 4.4. di bawah ini menggambarkan status pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir. Mayoritas penduduk Kabupaten Batang bekerja sebagai buruh/karyawan, diikuti penduduk yang berusaha sendiri, selanjutnya sebagai pekerja bebas pada urutan ketiga.

Melihat perkembangan status pekerjaan utama selama tiga tahun terakhir, di tengah pembangunan sejumlah kawasan industri baru di Kabupaten Batang, tren penduduk yang berstatus sebagai buruh/karyawan cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,54 persen, kemudian pada tahun 2022



naik menjadi 41,12 persen, dan terakhir kembali mengalami penurunan menjadi 37,29 persen.

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan, 2021-2023**

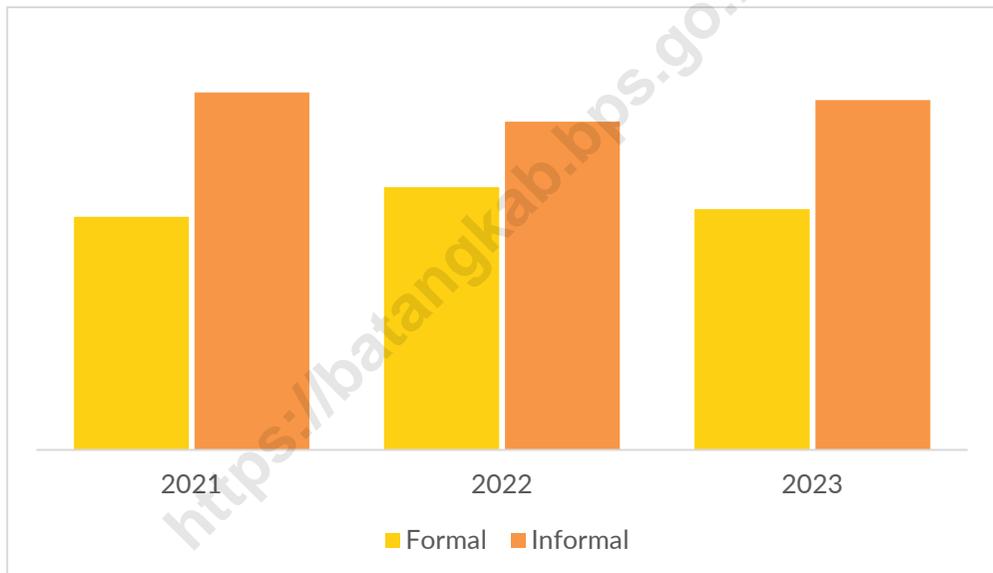
Status Pekerjaan Utama	2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Berusaha sendiri	17,99	30,89	<b>23,16</b>	21,63	26,32	<b>23,60</b>	19,41	26,83	<b>22,54</b>
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	11,51	12,86	<b>12,05</b>	10,63	8,24	<b>9,63</b>	18,69	15,74	<b>17,45</b>
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,51	2,06	<b>2,93</b>	3,76	2,75	<b>3,33</b>	3,78	2,61	<b>3,29</b>
Buruh/karyawan/pegawai	39,03	32,81	<b>36,54</b>	40,65	41,76	<b>41,12</b>	38,74	35,78	<b>37,49</b>
Pekerja Bebas	23,67	7,02	<b>17,00</b>	19,22	4,84	<b>13,19</b>	18,11	5,87	<b>12,95</b>
Pekerja keluarga/tak dibayar	4,29	14,37	<b>8,33</b>	4,10	16,08	<b>9,13</b>	1,27	13,18	<b>6,29</b>

Sumber: Diolah dari Sakernas

Sementara itu, dibandingkan tahun 2022, penduduk dengan status berusaha dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (dari 9,63 persen menjadi 17,45 persen). Demikian juga dengan kelompok penduduk yang berusaha sendiri maupun kelompok penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yang relatif stabil dan cenderung menunjukkan peningkatan. Pola tersebut diiringi dengan penduduk yang berstatus sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar yang relatif berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program pemerintah untuk mendorong lahirnya wirausaha baru yang juga mampu merangsang terciptanya lapangan pekerjaan baru, membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.



Jika dilihat dari struktur pekerja menurut status pekerjaan dan menurut jenis kelamin, maka status buruh/karyawan sangat dominan digeluti khususnya oleh pekerja laki-laki di Kabupaten Batang. Namun, hal yang tidak kalah menarik lainnya yang dapat dikaji dari Tabel 4.4 adalah bahwa cukup tingginya persentase penduduk perempuan bekerja berstatus berusaha sendiri. Hal ini mengindikasikan kemandirian perempuan dan merupakan sinyal positif untuk meningkatkan program pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha.



Sumber: Diolah dari Sakernas

**Gambar 4.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal, 2021-2023**

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi pekerja formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal yaitu yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pada tahun 2023 persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan



informal sebesar 59,22 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebesar 40,78 persen. Penduduk bekerja pada kegiatan formal tersebut pada tahun 2023 berkurang sebesar 3,67 persen poin jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 44,45 persen.

<https://batangkab.bps.go.id>



**5**

## TARAF DAN POLA KONSUMSI

<https://bangkab.bps.go.id>





<https://batangkab.bps.go.id>



## BAB 5

# TARAF & POLA KONSUMSI



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga dikatakan sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-makanan.

### PENGELUARAN RUMAH

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yang perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

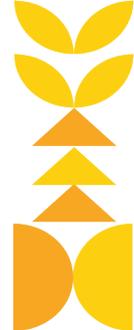


**Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, 2021-2023**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Per Bulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Makanan</b>	<b>494 856</b>	<b>524 404</b>	<b>588 789</b>	<b>54,03</b>	<b>53,41</b>	<b>52,24</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>421 000</b>	<b>457 382</b>	<b>538 373</b>	<b>45,97</b>	<b>46,59</b>	<b>47,76</b>
Perumahan	214 633	223 614	272 197	23,44	22,78	24,15
Barang & Jasa	91 942	111 602	119 250	10,04	11,37	10,58
Pakaian	28 033	33 641	32 646	3,06	3,43	2,90
Barang Tahan Lama	41 896	35 468	52 883	4,57	3,61	4,69
Lainnya	44 496	53 057	61 397	4,86	5,40	5,45
<b>Jumlah</b>	<b>915 857</b>	<b>981 785</b>	<b>1 127 161</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari Susenas

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2021 – 2023. Pada tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2021-2023, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 915.857,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 981.785,00 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp 1.127.161,00 pada tahun 2023. Apabila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami tren menurun. Pada tahun 2021 sebesar 54,03 persen turun menjadi 53,41 pada tahun 2022, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 52,24 persen. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan mengalami tren meningkat, dari sebesar 45,97 persen pada tahun 2021 menjadi 46,59 persen pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 47,76 persen pada tahun 2023. Pengeluaran perumahan menjadi pendorong utama peningkatan pengeluaran bukan makanan. Fenomena persentase pengeluaran makanan yang semakin kecil, tetapi secara nominal nilai pengeluaran makanan semakin besar, serta peningkatan pengeluaran non-makanan dapat diartikan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.



**Tabel 5.2 Rata – rata Pengeluaran untuk Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Komoditas, 2023 (Rupiah)**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	49 591	71 817	89 493	66 476
Umbi-Umbian	3 787	5 580	8 351	5 418
Ikan	18 903	41 317	65 431	37 188
Daging	10 868	20 923	49 709	22 666
Telur dan Susu	13 992	27 790	51 764	27 075
Sayur-Sayuran	31 536	48 073	69 954	45 845
Kacang-Kacangan	12 094	17 940	23 036	16 625
Buah-Buahan	12 701	24 248	60 712	26 931
Minyak dan Kelapa	8 960	16 402	23 681	14 886
Bahan Minuman	13 657	20 655	32 089	20 147
Bumbu-Bumbuan	10 239	15 278	23 222	14 854
Bahan Makanan Lainnya	7 495	10 547	18 479	10 915
Makanan Minuman Jadi	100 049	194 436	368 045	191 466
Rokok dan Tembakau	48 895	93 217	157 127	88 299
<b>Total Makanan</b>	<b>342 768</b>	<b>608 222</b>	<b>1 041 093</b>	<b>588 789</b>

Sumber: Diolah dari Susenas

Pada kelompok 40% terbawah, rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan didominasi oleh pengeluaran untuk makanan minuman jadi yaitu sebesar Rp 100.049,00, kemudian disusul pengeluaran untuk padi-padian yaitu sebesar Rp 49.591,00, pengeluaran untuk membeli rokok dan tembakau Rp 48.895,00, dan pengeluaran terkecil yaitu untuk membeli umbi-umbian yaitu mencapai sebesar Rp 3.787,00. Berbeda dengan kelompok 40% terbawah, pada kelompok 40% tengah dan 20% teratas setelah pengeluaran makanan minuman jadi, pengeluaran kedua terbesar adalah untuk membeli rokok dan tembakau.



Pada Tabel 5.2 dapat kita lihat bahwa pengeluaran makanan perkapita sebulan kelompok 20% teratas sekitar satu setengah kali pengeluaran makanan perkapita sebulan kelompok 40% tengah dan sekitar tiga kali pengeluaran makanan perkapita sebulan kelompok 40% terbawah. Hal ini menunjukkan ketimpangan di antara kelompok pengeluaran.

**Tabel 5.3 Rata –rata Pengeluaran untuk Bukan Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Jenis Komoditas, 2023 (Rupiah)**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan	Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	124 543	254 780	601 887	272 197
Aneka Barang dan Jasa	52 664	105 141	280 448	119 250
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	15 157	33 135	66 584	32 646
Barang Tahan Lama	6 754	24 424	201 969	52 883
Pajak, Pungutan dan Asuransi	26 023	38 725	86 198	43 148
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	1 187	13 159	62 506	18 249
<b>Total Bukan Makanan</b>	<b>226 328</b>	<b>469 364</b>	<b>1 299 591</b>	<b>538 373</b>

Sumber: Diolah dari Susenas

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikuatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran,



paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

**Tabel 5.4 Rata-rata Konsumsi Kalori Per kapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2023**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Per kapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	745,22	808,20	780,25	777,45
Umbi-Umbian	39,15	44,40	43,46	42,12
Ikan	40,31	59,50	71,94	54,32
Daging	43,73	62,64	88,29	60,21
Telur dan Susu	33,78	48,03	67,67	46,27
Sayur-Sayuran	40,74	48,76	54,15	46,63
Kacang-Kacangan	54,88	72,44	74,13	65,76
Buah-Buahan	29,57	41,26	61,97	40,73
Minyak dan Kelapa	194,64	254,43	288,38	237,34
Bahan Minuman	77,76	96,66	108,34	91,45
Bumbu-Bumbuan	13,32	18,87	20,82	17,04
Bahan Makanan Lainnya	41,20	49,44	69,63	50,19
Makanan Minuman Jadi	380,58	570,57	808,43	542,27
Rokok dan Tembakau	0	0	0	0
Total Makanan	1.734,89	2.175,19	2.537,45	2.071,79

Sumber : Diolah dari Susenas

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

**Tabel 5.5 Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari menurut Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran, 2023**

Jenis Komoditas	Kelompok Pengeluaran Perkapita Sebulan			
	40% Terbawah	40% Tengah	20% Teratas	Rata-rata
	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	Konsumsi Kalori Perkapita Sehari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-Padian	17,53	19,03	18,35	18,29
Umbi-Umbian	0,33	0,4	0,43	0,38
Ikan	6,9	10,16	12,19	9,27
Daging	2,65	3,87	5,52	3,71
Telur dan Susu	2,03	2,78	3,72	2,67
Sayur-Sayuran	2,45	2,89	3,16	2,77
Kacang-Kacangan	5,57	7,13	7,3	6,54
Buah-Buahan	0,32	0,44	0,71	0,45
Minyak dan Kelapa	0,08	0,14	0,12	0,11
Bahan Minuman	0,81	0,95	1,07	0,92
Bumbu-Bumbuan	0,53	0,74	0,83	0,68
Bahan Makanan Lainnya	0,8	0,96	1,32	0,97
Makanan Minuman Jadi	12,88	18,97	33,82	19,51
Rokok dan Tembakau	0	0	0	0
Total Makanan	52,88	68,48	88,55	66,26

Sumber: Diolah dari Susenas

Pada tahun 2023, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Batang sebesar 2.071,79 kkal. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori per hari penduduk



Kabupaten Batang di tahun 2023 belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Di antara tiga kelompok pengeluaran, hanya rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yang masih berada di bawah angka rata-rata kecukupan energi, yakni sebesar 1.734,89 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Batang yaitu sebesar 66,26 gram pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram per hari telah terpenuhi penduduk Kabupaten Batang. Namun, jika dilihat pada ketiga kelompok pengeluaran, rata-rata konsumsi protein per kapita pada kelompok 40% terbawah masih berada di bawah angka kecukupan protein, yakni sebesar 52,88 gram. Dengan melihat rata-rata konsumsi kalori dan protein pada ketiga kelompok pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa kelompok pengeluaran 40% terbawah memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah Kabupaten Batang karena belum memenuhi rata-rata kecukupan energi dan protein. Kebijakan yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pada kelompok tersebut.



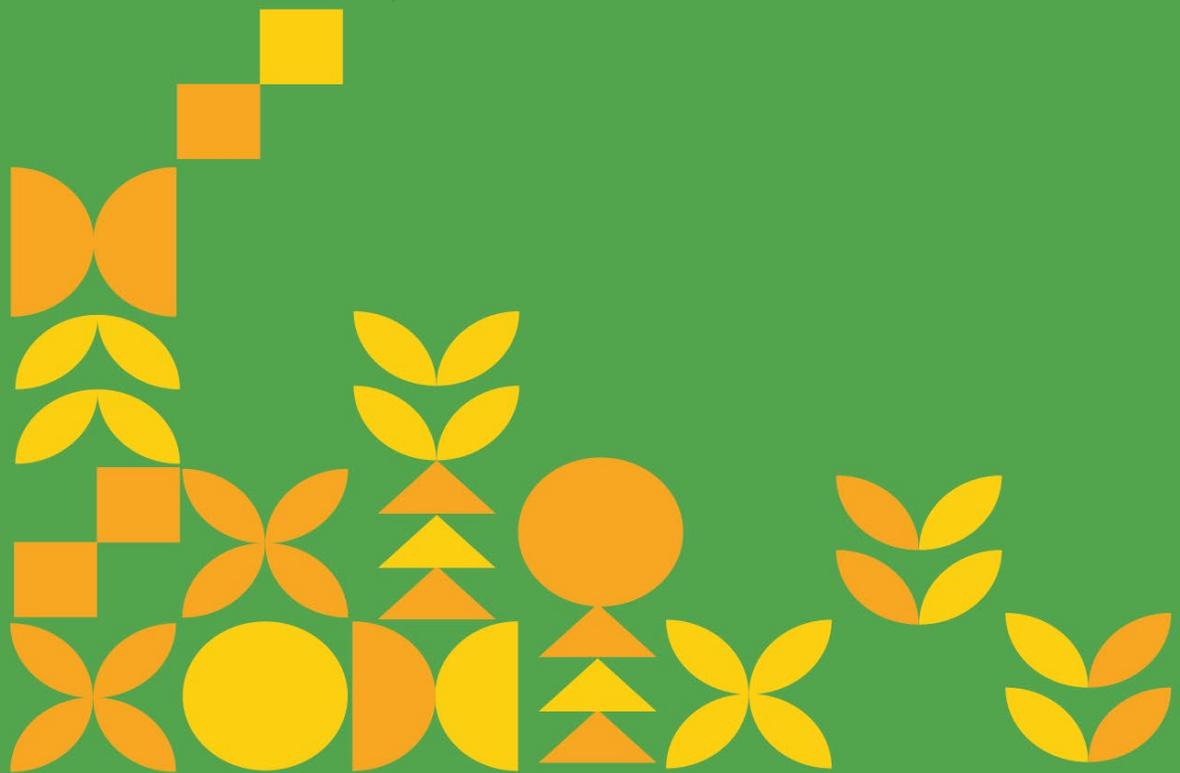
<https://batangkab.bps.go.id>



6

**PERUMAHAN**

<https://bangkab.bps.go.id>



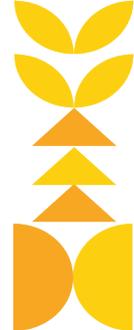


<https://batangkab.bps.go.id>



## BAB 6 PERUMAHAN

---



Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no. 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis.

Undang-Undang No, 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan



kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya

### KUALITAS RUMAH TINGGAL

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2021-2023 rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai bukan tanah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 86,23 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 90,35 persen, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi sebesar 90,91 persen.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2021-2023**

Indikator Perumahan	Tahun		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah (%)	86,23	90,35	90,91
Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, Esbes (%)	99,34	99,82	99,69
Dinding Terluas Tembok dan Kayu (%)	99,38	99,57	99,65

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas



Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas, rumah tangga yang tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes pada tahun 2021 sebesar 99,34 persen, pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 99,82 persen, tetapi pada tahun 2023 turun menjadi 99,69 persen. Pada tahun 2021 hingga 2023, rumah tangga dengan bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 99,38 persen, meningkat menjadi sebesar 99,57 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 99,65 persen pada tahun 2023.

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita, 2021-2023**

Luas Lantai Hunian	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
≤7,2 m <sup>2</sup>	1,19	1,30	0,62
7,3-9,9 m <sup>2</sup>	2,56	3,90	4,44
≥10 m <sup>2</sup>	96,25	94,80	94,94

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk penghuninya. Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 m<sup>2</sup>, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO), serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi (BPS, 2015).



Berdasarkan klasifikasi yang ditentukan oleh WHO, lebih dari 90 persen rumah tangga memiliki rumah dengan luas lantai per kapita minimal 10 m<sup>2</sup>. Selama tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita yang memenuhi standar WHO pada tahun 2021 sebesar 96,25 persen. Pada tahun 2022 sempat turun menjadi 94,80 persen, tetapi kembali meningkat menjadi 94,94 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 untuk pertama kali dalam tiga tahun persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita 7,2 m<sup>2</sup> ke bawah kurang dari satu persen, yaitu 0,62 persen.

## FASILITAS RUMAH

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2021 –2023**

Fasilitas Perumahan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerangan Listrik	100,00	100,00	100,00
Air Minum Kemasan/Isi Ulang/Leding	26,06	27,98	22,61
Tempat Pembuangan Akhir Tinja	35,03	28,24	22,99

Sumber : Diolah dari Hasil Susenas

Salah satu fasilitas perumahan yang penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas



tahun 2021-2023, seluruh rumah tangga di Kabupaten Batang telah menikmati fasilitas penerangan listrik.

Dari data hasil Susenas 2021-2023, rumah tangga di Kabupaten Batang yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding sebagai sumber air minum dan masak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 rumah tangga yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding mencapai 26,06 persen. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 27,98 persen, tetapi pada tahun 2023 berkurang menjadi 22,61 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak “saniter” akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air. Selain itu, juga menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2021-2023 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan septik tank menunjukkan adanya kecenderungan berkurang. Pada tahun 2021 sebesar 35,03 persen, menjadi sebesar 28,24 persen pada tahun 2022, dan terakhir menjadi sebesar 22,99 persen pada tahun 2023. Terjadinya pengurangan ini kemungkinan dikarenakan tidak adanya perawatan tangki septik sehingga pembuangannya beralih ke sungai atau tanah.

## STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan, dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal, Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal, Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orangtua/saudara atau status kepemilikan lainnya,



Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang,

Berdasarkan hasil Susenas 2023, sebagian besar rumah tangga telah menempati rumah milik sendiri, yakni sebesar 96,16 persen. Rumah tangga lain yang menempati rumah bebas sewa sebesar 2,94 persen, rumah dinas sebesar 0,77 persen, dan yang menempati rumah kontrak/sewa hanya sebesar 0,12 persen. Di Kabupaten Batang kepemilikan rumah milik sendiri mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan perkembangan pembangunan perumahan KPR di Batang, Perijinan pembangunan perumahan yang relatif mudah oleh Pemerintah Kabupaten Batang turut mendukung rumah tangga untuk memiliki rumah sendiri.

**Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2021–2023**

Fasilitas Perumahan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	93,91	96,20	96,16
Kontrak/sewa	0,42	0,50	0,12
Bebas sewa	5,67	3,30	2,94
Dinas	0,00	0,00	0,77

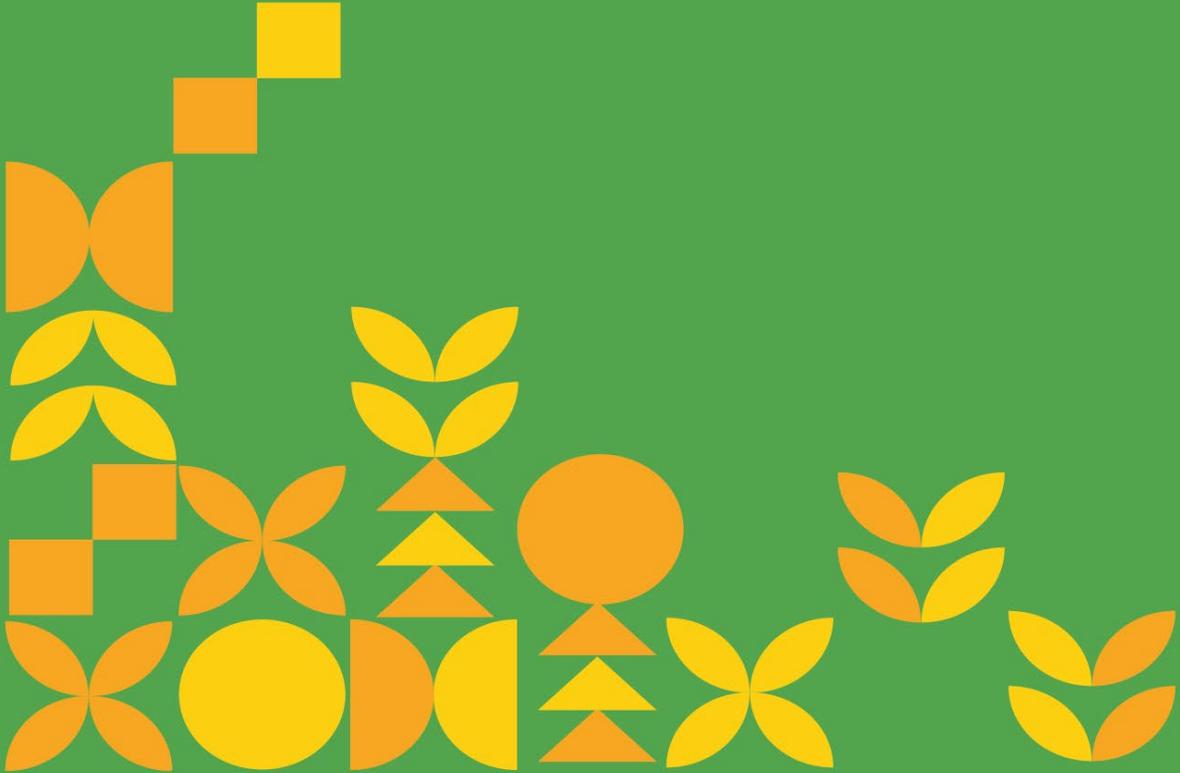
Sumber: Diolah dari Hasil Susenas



7

**KEMISKINAN**

<https://bangkab.bps.go.id>





<https://batangkab.bps.go.id>



## BAB 7 KEMISKINAN



Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan, Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS), Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik, Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Batang,

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya,

### PERKEMBANGAN PENDUDUK

Selama periode 2021-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang menunjukkan tren yang cenderung turun. Tahun 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hampir 5 persen, dari 74,9 ribu penduduk miskin di tahun 2021 menjadi 69,9 ribu penduduk miskin di tahun 2022. Sementara itu pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,03 persen, dari 69,94 ribu penduduk miskin di tahun 2022 menjadi 69,97 ribu penduduk miskin di tahun 2023.



**Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin, 2021-2023**

Tahun	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(3)	(4)
2021	74 910	9,68
2022	69 940	8,98
2023	69 970	8,92

Sumber: Diolah dari Susenas

### **GARIS KEMISKINAN (GK), INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P<sub>1</sub>), INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P<sub>2</sub>)**

**Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, 2021-2023 (Rp/Kapita/Bulan)**

Indikator Kemiskinan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan (Rupiah)	318 330	341 252	378 858
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,76	1,26	1,85
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,48	0,29	0,60

Sumber: Diolah dari Susenas

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin, Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan, Garis kemiskinan di Kabupaten Batang mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, garis kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar Rp 318.330,00 yang artinya adalah apabila pengeluaran satu orang dalam waktu sebulan untuk kebutuhan sehari-hari kurang dari nilai tersebut, maka disebut sebagai penduduk miskin. Tahun 2023 garis kemiskinan meningkat



menjadi Rp 378.858,00. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun dan juga meningkatnya gaya hidup penduduk.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh di bawah rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. P1 Kabupaten Batang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023, dimana sebelumnya sebesar 1,26 di tahun 2022 menjadi 1,85 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan semakin besar dan kuat pula upaya yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin tersebut dari kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kondisi P2 di Kabupaten Batang tidak berbeda jauh dengan P1, dimana P2 Kabupaten Batang mengalami kenaikan dari 0,29 di tahun 2022 menjadi 0,60 di tahun 2023.

Dari indikator kemiskinan di atas upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih diprioritaskan utamanya di daerah perdesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam dan terlalu parah”. Hal ini agar target kemiskinan sesuai RPJMD dapat dipenuhi, Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, dan juga kondisi perumahan, Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.



# KESIMPULAN

Kesejahteraan rakyat meliputi berbagai aspek dimensi kehidupan yang kompleks dan luas. Berbagai konsep serta indikator telah dikembangkan guna mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di suatu wilayah. Publikasi ini membahas aspek kesejahteraan berdasarkan data dan indikator yang lebih terukur serta memenuhi aspek keterbandingan antar waktu maupun wilayah. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi kesejahteraan di Kabupaten Batang antara lain :

## 1. Bidang Kependudukan

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Batang tahun 2023 mencapai 828.883 jiwa, terdiri dari 417.808 jiwa penduduk laki-laki dan 411.075 jiwa penduduk perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,17 persen. Penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,64. Struktur penduduk Kabupaten Batang tahun 2023 didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 69,44 persen serta angka beban ketergantungan sebesar 44,02 persen.

## 2. Bidang Kesehatan dan Gizi

- a. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Batang cenderung meningkat, pada tahun 2021 mencapai 8,50 persen, kemudian naik menjadi 12,66 persen tahun 2023. Angka kesakitan laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan dengan perempuan karena faktor pola hidup dan aktivitas sehari-hari serta perilaku manusia. Pada tahun 2023, angka kesakitan laki-laki mencapai 11,15 persen, dan angka kesakitan perempuan mencapai 14,17 persen.
- b. Pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Batang yang berobat jalan paling banyak memilih mendatangi praktek dokter / klinik / bidan / balai pengobatan sebesar 59,41 persen, kemudian puskesmas di urutan kedua sebesar 29,71 persen, selanjutnya



rumah sakit swasta sebesar 6,37 persen, rumah sakit pemerintah sebesar 5,41 persen, pengobatan tradisional sebesar 2,60 persen, dan lainnya sebesar 0,42 persen.

### **3. Bidang Pendidikan**

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan. Selama lima tahun terakhir, kualitas pendidikan di Kabupaten Batang yang diukur berdasarkan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang mudah dijangkau. Untuk menjadi perhatian yang mendasar adalah bahwa kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 20 persen APBN untuk dunia Pendidikan perlu ditelaah lebih lanjut apakah sudah tepat, di beberapa kebijakan yang terkait pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang cenderung fluktuatif, pada laki-laki sempat mengalami peningkatan namun pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Hal sebaliknya terjadi pada APS perempuan.

### **4. Bidang Ketenagakerjaan**

- a. Dalam periode 2019 hingga 2023, TPAK Kabupaten Batang secara umum memiliki tren yang meningkat. TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Namun, laju kenaikan TPAK perempuan tampak lebih cepat. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Batang makin menggeliat.
- b. Setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2020 akibat pandemi covid-19 dan pembatasan aktivitas sosial masyarakat, pada tahun-tahun berikutnya TPT Kabupaten Batang cenderung mengalami penurunan. TPT Kabupaten Batang di tahun 2023 sebesar 6,06 persen, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2020.
- c. Dilihat dari struktur penduduk bekerja menurut kelompok usaha, mayoritas penduduk bekerja di kelompok usaha jasa. Lebih lanjut, dari aspek kegiatannya, mayoritas penduduk bekerja di sektor informal.



## 5. Pola Konsumsi

- a. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk tahun 2023 sebesar Rp 1.127.161 dengan komposisi: 52,24 persen pengeluaran makanan dan 47,76 persen pengeluaran non makanan.
- b. Secara umum, rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 2.071,79 kkal dan protein per kapita penduduk Kabupaten Batang sebesar 66,26 gram per hari sudah memenuhi syarat kecukupan gizi yang disyaratkan (Syarat kecukupan energi sebesar 1.734,89 kkal dan protein sebesar 57 gram per hari). Kecukupan gizi baik kalori maupun protein dialami oleh 20 persen masyarakat berpendapatan tertinggi dan 40 persen masyarakat berpendapatan sedang. Sedangkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah belum memenuhi rata-rata kecukupan gizi, baik jumlah kalori maupun protein per harinya.

## 6. Perumahan

Kualitas dan penggunaan fasilitas perumahan rumah tangga di Kabupaten Batang tahun 2023 dihitung baik yang ditandai dengan tingginya persentase rumah dengan lantai bukan tanah yaitu sebesar 90,91 persen; penggunaan atap beton, genteng, sirap, seng, asbes sebesar 99,69 persen; penggunaan dinding terluas tembok dan kayu sebesar 99,65 persen; luas rumah per kapita di atas 10 m<sup>2</sup> sebesar 94,94 persen; penggunaan air bersih sebesar persen. Selain itu, seluruh rumah tangga di Kabupaten Batang telah menikmati fasilitas penerangan listrik.

## 7. Kemiskinan

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang sedikit mengalami kenaikan di tahun 2023, dimana terdapat 69,94 ribu penduduk miskin di tahun 2022 menjadi 69,97 ribu penduduk miskin di tahun 2023. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang mengalami penurunan dimana tahun 2022 persentase penduduk miskin adalah sebesar 8,98 persen menjadi 8,92 persen di tahun 2023. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Batang mengalami kenaikan di tahun 2023. P1 Kabupaten Batang tahun 2023 sebesar 1,85, dimana kenaikan P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis



kemiskinan. P2 Kabupaten Batang 2023 sebesar 0,60, dimana kenaikan P2 menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

<https://batangkab.bps.go.id>

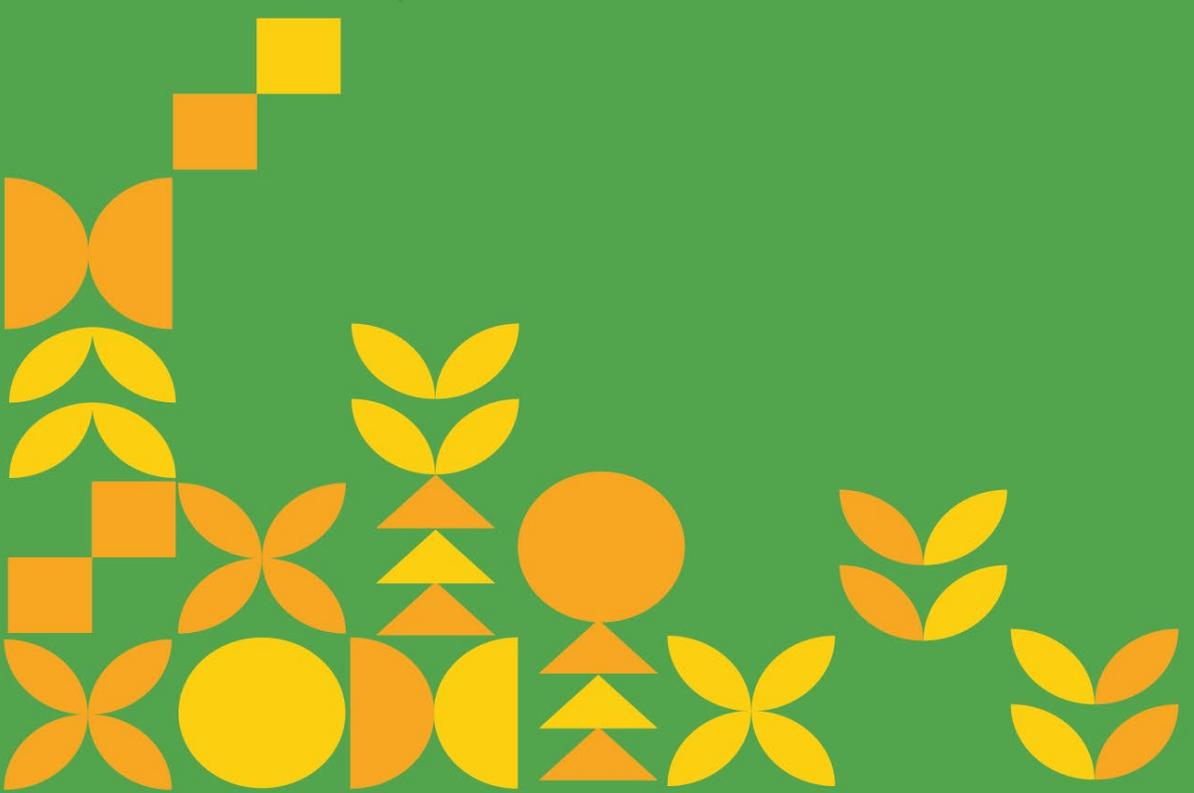


<https://batangkab.bps.go.id>



**DAFTAR PUSTAKA**

<https://batangkep.bps.go.id>





<https://batangkab.bps.go.id>

# DAFTAR PUSTAKA

Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2023.

Berita Resmi Statistik Kemiskinan Kabupaten Batang 2023.

Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang 2022.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023. *Statistik Kesejahteraan Prov. Jateng 2023*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2023*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2023*. Semarang.

BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023. *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah 2023*. Semarang.

BPS Kabupaten Batang, 2023. *Kabupaten Batang Dalam Angka 2023*. Batang 2023.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2322/dpr-ri-sahkan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>

<https://corona.batangkab.go.id/>

<https://dapo.kemendikbud.go.id/>

<https://lokadata.id/artikel/rasio-murid-guru-cukup-sebaran-masih-kurang>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BATANG**

Jalan Pemuda No. 90 Batang 51215

Telp/Fax (0285)391004

Homepage: [batangkab.bps.go.id](http://batangkab.bps.go.id)